

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat–Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

BAMBANG SETYO WAHYUDI

B 200 060 184

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah tingkat II yang dijadikan proyek percontohan uji coba otonomi daerah. Pemilihan daerah tingkat II untuk dijadikan proyek percontohan otonomi daerah ini didasarkan pada kemampuan dan potensi daerah untuk mandiri secara ekonomi, artinya pada saat otonomi daerah, daerah yang bersangkutan harus mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pemerintah di daerahnya termasuk menggaji pegawai yang sudah dilimpahkan dari pusat kepada daerah tingkat II.

Menurut penelitian Sularmi dan Suwarno (2006), dengan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Dalam menjalani otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan

roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan membangun seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Berdasarkan penelitian Setaji dan Priyo (2007), dalam era sekarang ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Seperti halnya dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiasmo (2000), penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah pada era reformasi sekarang ini lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut penelitian Susetyo (2008), sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1999 yang telah menjadi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, akan terjadi beberapa perubahan yang mendasar di dalam penyelenggaraan sistem Pemda, termasuk pelaksanaan manajemen keuangan Pemda. Perubahan tersebut antara lain pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan dan anggaran daerah.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauhmana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan Pemda dalam mengelola keuangan termuat dalam APBD yang menggambarkan kemampuan Pemda dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja Pemda ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemda. Pengukuran Kinerja Pemda mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas Pemda. Untuk itu Pemda dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang-kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002:299).

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat mencari laba (*profit oriented*), namun masih jarang yang dilakukan pada lembaga atau organisasi yang bersifat tidak mencari laba (*non-profit oriented*) khususnya Pemda. Hal ini terjadi karena penyajian laporan keuangan Pemda mempunyai keterbatasan serta sifat dan cakupan yang berbeda.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2002:121).

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan daerah di Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana kinerja keuangan Pemda Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari analisis rasio keuangan APBD?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada perkembangan kinerja keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006-2008.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui kinerja

keuangan Pemda Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2006-2008.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang di antaranya:

1. Mengetahui posisi keuangan Pemda di Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006-2008.
2. Mengetahui perbedaan kondisi keuangan di Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006-2008.
3. Dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan bagi Pemda di Kabupaten Grobogan.

F. Sistematik Penelitian

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pembahasan tentang akuntansi pemerintah, otonomi daerah, tinjauan keuangan daerah, APBD, analisis rasio APBD, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum daerah Kabupaten Grobogan, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran.